



**PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MOJOKERO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKJ Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ini merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan sub kegiatan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Tahun 2025. Selain itu laporan LKJ ini juga memberikan gambaran kendala/permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Tahun 2025. Selanjutnya LKJ akan digunakan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial di tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum, saran dan masukan akan kami pergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial kedepan.

Mojokerto, Februari 2026

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 198705192006021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 6 indikator kinerja program, 12 indikator kinerja kegiatan dan 33 target kinerja sub kegiatan yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dan dengan 6 indikator kinerja program, 12 indikator kinerja kegiatan dan 33 target kinerja sub kegiatan yang harus dicapai.

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sumber Data Dinas Sosial

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya PPKS yang Mandiri

Sumber Data Dinas Sosial

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
- 2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
- 3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
- 4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

- 1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97,98%	130,29%	132,98%

Sumber Data Dinas Sosial

Selain kinerja di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu :

No	Kinerja	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 (A)	82,56 (A)	101,30%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	81,64%	84,95%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	81,60 (Tinggi)	100,74%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100%

Sumber Data Dinas Sosial

2. Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	0,022%	0,066%	300%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,56	101,30%

Sumber Data Dinas Sosial

Kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 23.305.351.481,00 atau 81,64% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 28.547.288.507,00.

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

IKHTISAR EKSEKUTIF 3

DAFTAR ISI 6

BAB I 7

PENDAHULUAN..... 7

I.1 LATAR BELAKANG..... 7

I.2 GAMBARAN UMUM 8

I.3 ISU ISU STRATEGIS 12

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN 15

BAB II 17

PERENCANAAN KINERJA 17

II.1 PENJENJANGAN STRATEGIS..... 17

II.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA 35

II.3 PERJANJIAN KINERJA 38

BAB III 42

AKUNTABILITAS KINERJA..... 42

III.1 PENGUKURAN KINERJA 42

III.2 ANALISIS KINERJA..... 46

III.3 PRESTASI KINERJA LAINNYA..... 55

III.4 AKUNTABILITAS KINERJA ANGGARAN..... 58

BAB IV 60

PENUTUP 60

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance, diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan valid sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKJ Dinas Sosial Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029, khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Disamping itu penyusunan LKJ ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

Dasar Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
5. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya;
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

I.2 GAMBARAN UMUM

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

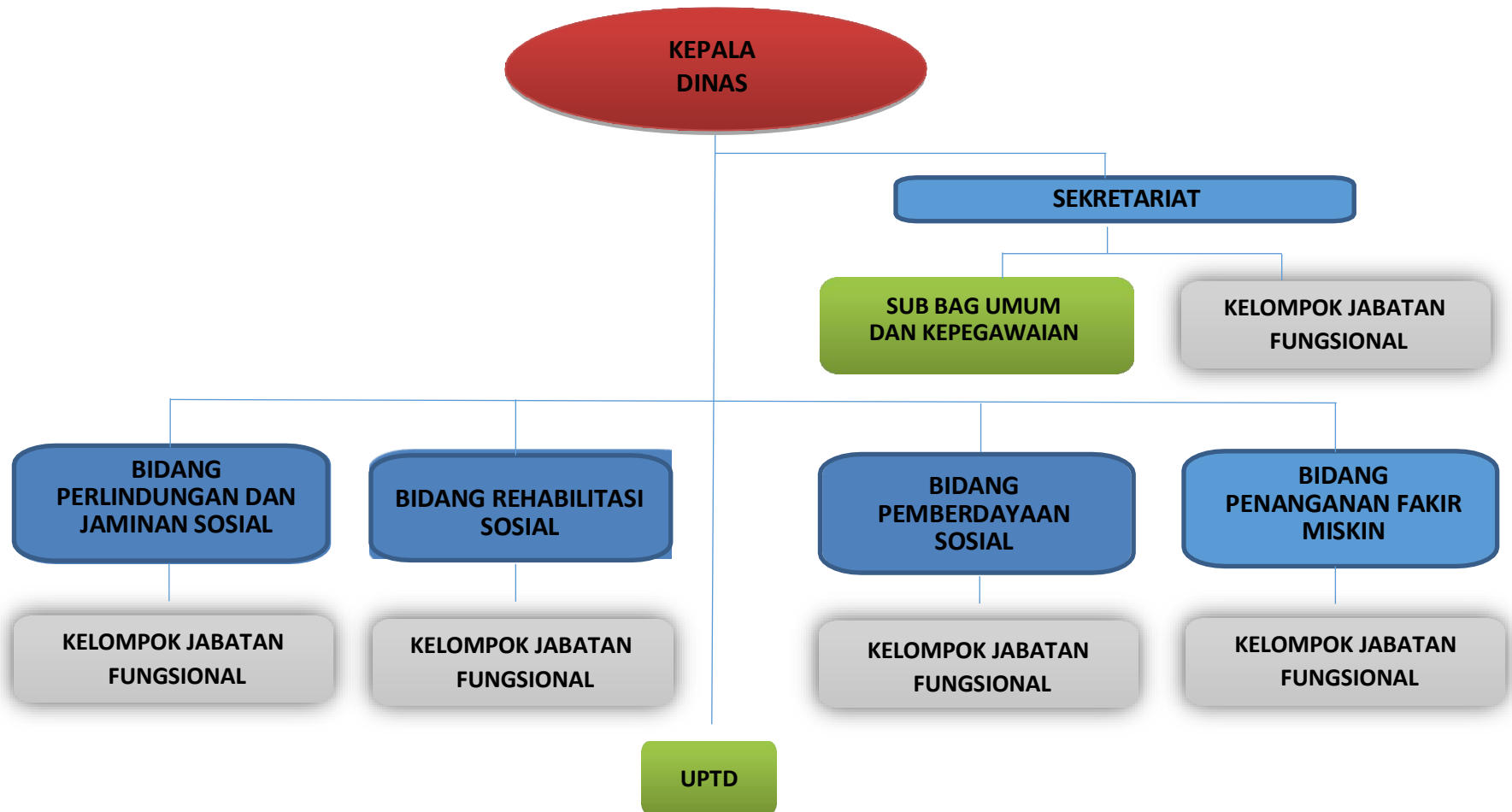
Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat membawahi, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Sosial
Kabupaten Mojokerto



Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dalam menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di bidang sosial;
- b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dan jaminan sosial keluarga, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan anak, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan

masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, serta pengelolaan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 24 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 9 perempuan.

Aset

Aset yang dimiliki meliputi kendaraan dinas, peralatan kerja, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menunjang kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh fasilitas perkantoran, teknologi informasi serta jaringan komunikasi yang memadai guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

I.3 ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah disajikan pada RPJMD 2025-2029 terdapat berbagai tantangan dan penanganan khususnya pada urusan sosial yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah urusan sosial yang ada di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan layanan terhadap seluruh PPKS;
2. Penyelenggaraan layanan Kes Sos yang sesuai standar/peraturan;
3. Akurasi data kesejahteraan sosial.

Inovasi

Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, Dinas Sosial memiliki 3 (tiga) Inovasi sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu :

1. SANG PATIH KESOS (Sarana Pengaduan Dengan Pelayanan Hati dan Kasih Sayang dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial);
2. BULIK SOIMA (Bupati Tilik Deso Mirsani Masyarakat);
3. GERBANG KESOS (Gerakan Edukasi serta Pemberian Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Berikut link data dukung Inovasi <https://bit.ly/Inovasi-Dinsos>

Cascading

Sesuai dengan Misi Ketiga Bupati Mojokerto yaitu : ***Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera***, Dinas Sosial mempunyai tujuan ***Meningkatnya Kesejahteraan Sosial***.

Adapun Sasaran strategis yang digunakan Dinas Sosial pada Tahun 2025, yaitu :

- ***Meningkatnya PPKS yang mandiri***

Dari sasaran strategis ini program yang dijalankan ada 6 (enam), dengan kegiatan sebanyak 13 (tiga belas), dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan , yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ada 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub. Kegiatan;

2. Program Pemberdayaan Sosial, ada 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub. Kegiatan;
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, ada 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub. Kegiatan;
4. Program Penanganan Bencana, ada 2 (dua) Kegiatan dan 4 (empat) Sub. Kegiatan;
5. Program Rehabilitasi Sosial, ada 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub. Kegiatan;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub. Kegiatan.

Berikut link data dukung Cascading
<https://drive.google.com/file/d/16JG8krOiz8EySuBxPkjLR1fIMpXAu4FD/view?usp=sharing>

Dari cascading Dinas Sosial tersebut, maka dibuatkan Logical framework. Logical framework atau kerangka kerja logis adalah metode perencanaan yang sistematis dan terukur.

Manfaat Logical framework adalah :

1. Membantu mengorganisir program dan kegiatan;
2. Membantu menentukan tujuan dan indikator keberhasilan;
3. Membantu merencanakan langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan;
4. Membantu menghubungkan kegiatan, investasi, dan hasil;
5. Membantu menetapkan indikator kinerja dan alokasi tanggung jawab;
6. Membantu berkomunikasi dengan jelas;
7. Membantu menyesuaikan dengan keadaan yang berubah;
8. Membantu mempertimbangkan risiko.

Berikut link data dukung Logical Framework

<https://docs.google.com/presentation/d/1dTWiQ5AEhF13M9MpVVREQsBZ0pVXxwe9/edit?usp=sharing&oid=111883697825076063648&rtpof=true&sd=true>

Dan untuk menghubungkan sasaran strategis Dinas Sosial dengan keterkaitan program pada bidang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, maka disusunlah Crosscutting.

Berikut link data dukung Crosscutting

<https://docs.google.com/presentation/d/1KZz5pxzljNLmOdM1RLh5VBIRjlzSnKiW/edit?usp=sharing&oid=111883697825076063648&rtpof=true&sd=true>

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatan. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PENJENJANGAN STRATEGIS

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan tugas utama “Membantu Bupati urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial”, mendukung pencapaian misi ke-2 :

“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya :

Tabel II.1.A

Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target
1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%
			Indeks Profesionalitas ASN	81,00
2. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah			Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	3
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90%
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%
	1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	89%
		1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
		3 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Laporan
		2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97,98%
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	65%
	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS yang dibina dan difasilitasi	72 Orang, 90 Lembaga
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	90 Lembaga

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang
		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang
C	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55%
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data fakir miskin yang dikelola	523.155 Keluarga, 20 Orang
		1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	424.995 Keluarga
		2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	98.160 Keluarga
		3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target
D	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	50%
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.000 Orang
		1 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang
		2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	250 Orang
		3 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	250 Orang
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang
E	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	45%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	1.040 Orang
		1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	820 Orang
		2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang
		3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang
		6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
		7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang
		8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang
		9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		10	Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	188 Orang
		1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	188 Orang
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%
	1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	6 Makam
		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	6 Makam

Sumber Data Dinas Sosial

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mendukung pencapaian misi ke-3 :

“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera”

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.B

Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90%
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%
			Indeks Profesionalitas ASN	81,00
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai minimal 90%	90%
		1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
		2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan laporan keuangan yang ditindaklanjuti	96,10%
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
		3	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana sesuai standar	90%
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	90%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Laporan
	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit
Meningkatnya PPKS yang mandiri			Persentase PPKS yang mandiri	0,022%
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%
	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	100%
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	90 Lembaga

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	72 Penyuluh
C	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase Desa yang updating SIKS-NG	90%
	1		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar	4%
		1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	215.000 Usulan
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	0,18%
		2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12,00%
	1		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri	0,020%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.430 PM
D	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar	100%
		1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang
		2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	250 Orang
		3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	250 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator	Target
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat	100%
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	46 Orang
E	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	0,20%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,10%
	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	820 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang
		3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang
		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Orang
		6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang
		8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
		9	Pemberian Layanan Kedaruratan Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	0,04%
		1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	188 Orang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator	Target
		2	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%
	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota		Persentase Makam yang terpenuhi pemeliharaannya	100%
		1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	6 Makam

Sumber Data Dinas Sosial

II.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto memiliki indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut :

Tabel II.2.A

Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	$\frac{(\text{Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial} / \text{DTKS}) \times 100\%}{}$	DTKS
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Keterangan Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 - 70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 - 90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat
		Persentase Realisasi Anggaran Dinas Sosial	Persen	$\frac{(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%}{}$	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial	Nilai	Keterangan IP ASN : Kategori Sangat Rendah : = < 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Sosial	Laporan Inovasi Dinas Sosial

Sumber Data Dinas Sosial

Tabel II.2.B

Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode
Tahun 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	Persen	Jumlah PPKS yang meningkat mandiri $\frac{\quad}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$ Penjelasan : $\frac{157}{2.357} \times 100\%$ Terdiri dari : 1. PKH Graduasi 29 Orang 2. Banmas Lijamsos 20 Orang 3. Alban APBD 30 Orang 4. Alban APBN Provinsi 63 Orang 5. Alban APBN Balai 15 Orang	Data PPKS Kab. Mojokerto Tahun 2025
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE SAKIP dari Inspektorat

Sumber Data Dinas Sosial

II.3 PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika :

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut :

Tabel II.3.A

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97,98%	130,29%	132,98%

Sumber Data Dinas Sosial

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu :

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,56	101,30%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	81,64%	84,95%
		Indeks Profesionalitas ASN	81,00	81,60	100,74%
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan	3	3	100%

Sumber Data Dinas Sosial

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 5.663.945.390
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 279.000.000
3	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 9.675.743.700
4	Program Penanganan Bencana	Rp. 105.000.000
5	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.545.927.967

No	Program	Anggaran
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 10.000.000

Sumber Data Dinas Sosial

Tabel II.3.B

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode Tahun 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	0,022%	0,066%	300%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,56	101,30%

Sumber Data Dinas Sosial

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 4.740.288.140
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 262,275.000
3	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 21.916.628.400
4	Program Penanganan Bencana	Rp. 93.459.500
5	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.525.137.467
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 9.500.000

Sumber Data Dinas Sosial

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam link LKJ Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Berikut link data dukung PK APBD dan PK Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1-uBSF-Yt59N0PQ80gGoVq5J--4-6eZ2V?usp=sharing>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran yang diperjanjikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.A.

Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan
Periode Tahun 2021-2025)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97,98%	130,29%	132,98%

Sumber Data Dinas Sosial

Selain sasaran di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu :

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 (A)	82,56 (A)	101,30%
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	81,64%	84,95%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	81,60 (Tinggi)	100,74%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3	100%

Sumber Data Dinas Sosial

Adapun program yang mendukung di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90%	90%	100%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	65%	65%	100%
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55%	55%	100%

4	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	50%	50%	100%
5	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	45%	45%	100%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	100%	100%	100%

Sumber Data Dinas Sosial

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja Periode Perencanaan Tahun 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Tabel III.1.B.

Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	0,022%	0,066%	300%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,56	101,30%

Sumber Data Dinas Sosial

Adapun program yang mendukung di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90%	90%	100%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,10%	81,64%	84,95%
		Indeks Profesionalitas ASN	81,00	81,60	100,74%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	100%	100%
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	99%	90%	100%
		Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12,00%	12,00%	100%
4	Program Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100%	100%	100%
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100%	100%	100%
5	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	0,20%	0,20%	100%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100%	100%	100%

III.2 ANALISIS KINERJA

Di Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja dan 2 kinerja lainnya dengan 4 indikator kinerja, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan indikator kinerja “Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar”, dengan formulasi perhitungan “(Jumlah penerima bantuan sosial dan layanan sosial) / (DTKS) X100%”;
2. Kinerja lainnya “Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel” mempunyai 3 indikator, “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan formulasi perhitungan “Laporan Hasil Evaluasi SAKIP”; “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” dengan formulasi perhitungan “(Realisasi Anggaran) / (Pagu Anggaran) X100%”; dan “Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial” dengan formulasi perhitungan “Indeks Profesionalitas ASN Dinas Sosial”;
3. Kinerja lainnya “Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah” dengan indikator kinerja “Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Sosial” dengan formulasi perhitungan “Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Dinas Sosial”.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya PPKS yang mandiri” dengan indikator kinerja “Persentase PPKS yang mandiri”, dengan formulasi perhitungan “(Jumlah PPKS yang meningkat mandiri) / (Jumlah PPKS) X 100%”;

2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”, dengan formulasi perhitungan “Laporan Hasil Evaluasi SAKIP”.

Tabel III.2.A.

Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	82,18%	97,97%	130,29%	98,08%	132,84%

Sumber Data Dinas Sosial

1. Capaian indikator “Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar” di Tahun 2025 sebesar 132,98%, angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 97,98% dan realisasi sebesar 130,29%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan terdapat tambahan beberapa jenis bantuan sosial (BLTS Kesra, WRSE dan KIP JAWARA, Permakanan disabilitas, dll).

Selain sasaran di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu :

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,35	80,48	80,98	81,10	82,56	81,30	101,54
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80%	80%	95,53%	94,83%	81,64%	96,35%	84,73%
		Indeks Profesionalitas ASN	60	60	78,01	79,72	81,60	81,25	100,43
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	2	3	3	3	100

Sumber Data Dinas Sosial

1. Capaian indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” di Tahun 2025 sebesar 101,30% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 81,50 dan realisasi sebesar 82,56. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
 - a. Adanya bukti dukung yang relevan;
 - b. Adanya keterlibatan ASN Dinas Sosial;
 - c. Adanya dukungan dan keterlibatan/koordinasi dengan instansi terkait.

2. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” di Tahun 2025 sebesar 84,95% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 96,10% dan realisasi sebesar 81,64%. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan sisa anggaran untuk tanah Sekolah Rakyat (SR).
3. Capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN” di Tahun 2025 sebesar 100,74% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 81,00 dan realisasi sebesar 81,60. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
 - a. ASN Dinas Sosial aktif mengikuti pelatihan dan telah mengunggah sertifikat pelatihan maupun seminar pada aplikasi MyASN;
 - b. Melaksanakan monitoring secara rutin terhadap kelengkapan data Indeks Profesionalitas ASN sebagai dasar percepatan perbaikan nilai indikator.
4. Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan” di Tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 3 Inovasi dan realisasi sebesar 3 Inovasi. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
 - a. Mengintegrasikan inovasi ke dalam proses bisnis dan tata kelola organisasi sehingga dapat diinternalisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keberlanjutan pelaksanaan inovasi untuk memastikan manfaatnya tetap dirasakan;
 - c. Mendorong komitmen pimpinan dan partisipasi aparatur dalam pengembangan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Selain kinerja tambahan di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Dokumen
Perencanaan Periode Tahun 2021-2025) juga terdapat program, yaitu :

No	Program	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	90%	90%	82,18%	97,97%	90%	90%	100%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80%	80%	75%	75%	75%	75%	100%
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	65%	60%	60%	55%	55%	55%	100%
4	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan Sosial	70%	60%	60%	50%	50%	50%	100%
5	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial	65%	60%	55%	50%	45%	45%	100%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Dinas Sosial

Pada umumnya capaian indikator kinerja program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2021-2025 di Tahun 2025 tidak dapat tercapai dikarenakan indikator kinerja yang berbeda.

Tabel III.2.B.

Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2025-2029)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	0,028%	0,066%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10	82,56

Sumber Data Dinas Sosial

Di Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai Dokumen Perencanaan Periode Tahun 2025-2029) juga terdapat program, yaitu :

No	Program	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	NA	NA	NA	NA	90%	90%	100%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	80%	80%	95,53%	94,83%	81,64%	96,35%	84,73%
		Indeks Profesionalitas ASN	60	60	78,01	79,72	81,60	83,50	97,72%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir Renstra	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	NA	NA	NA	NA	90%	94%	95,74%
		Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	NA	NA	NA	NA	12,00%	22%	54,54%
4	Program Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%
5	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	NA	NA	NA	NA	0,20%	1,50%	13,33%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	NA	NA	100	100	100%	100%	100%

Sumber Data Dinas Sosial

1. Capaian indikator “Meningkatnya PPKS yang mandiri” di Tahun 2025 sebesar 300% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 0,022% dan realisasi sebesar 0,066%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
 - a. Jumlah PPKS yang meningkat mandiri sudah sesuai sasaran;
 - b. Memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Capaian indikator “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah” di Tahun 2025 sebesar 101,30% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 81,50 dan realisasi sebesar 82,56. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
 - a. Adanya bukti dukung yang relevan;
 - b. Adanya keterlibatan ASN Dinas Sosial;
 - c. Adanya dukungan dan keterlibatan/koordinasi dengan instansi terkait.
3. Capaian indikator “Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan” di Tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 90% dan realisasi sebesar 90%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan survey kepuasan pengguna layanan kesekretariatan;
4. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” di Tahun 2025 sebesar 84,95% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 96,10% dan realisasi sebesar 81,64%. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan sisa anggaran untuk tanah Sekolah Rakyat (SR);
5. Capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN” di Tahun 2025 sebesar 100,74% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 81,00 dan realisasi sebesar 81,60. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
 - a. ASN Dinas Sosial aktif mengikuti pelatihan dan telah mengunggah sertifikat pelatihan maupun seminar pada aplikasi MyASN;
 - b. Melaksanakan monitoring secara rutin terhadap kelengkapan data Indeks Profesionalitas ASN sebagai dasar percepatan perbaikan nilai indikator.
6. Capaian indikator “Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif” di Tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan jumlah PSKS yang aktif sesuai dengan umlah PSKS yang ada;

7. Capaian indikator “Persentase Desa yang updating SIKS-NG” di Tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 90% dan realisasi sebesar 90%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan Tingkat keaktifan Operator Desa terhadap SIKS-NG dan DTSEN;
8. Capaian indikator “Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha” di Tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 12,00% dan realisasi sebesar 12,00%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan jumlah keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial sudah sesuai dengan KPM;
9. Capaian indikator “Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat” di Tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan jumlah PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana maupun pasca bencana sesuai dengan jumlah PPKS korban bencana yang ada;
10. Capaian indikator “Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif” di Tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan jumlah PSKS yang aktif sesuai dengan jumlah PSKS yang ada;
11. Capaian indikator “Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar” di Tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 0,20% dan realisasi sebesar 0,20%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai dengan jumlah PPKS yang ada;
12. Capaian indikator “Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik” di Tahun 2025 sebesar 100% angka capaian tersebut didapatkan dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan jumlah makam yang seharusnya dikelola sesuai dengan jumlah makam yang terkelola.

Berdasarkan Tabel III.2.B Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan, progres capaian Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah mencapai 101,84%. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung refocusing prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa :

- Penghematan listrik dan air dengan mematikan komputer/AC/lampu/dll saat tidak digunakan;
- Penghapusan mamin rapat internal;
- Efisiensi perjalanan dinas.

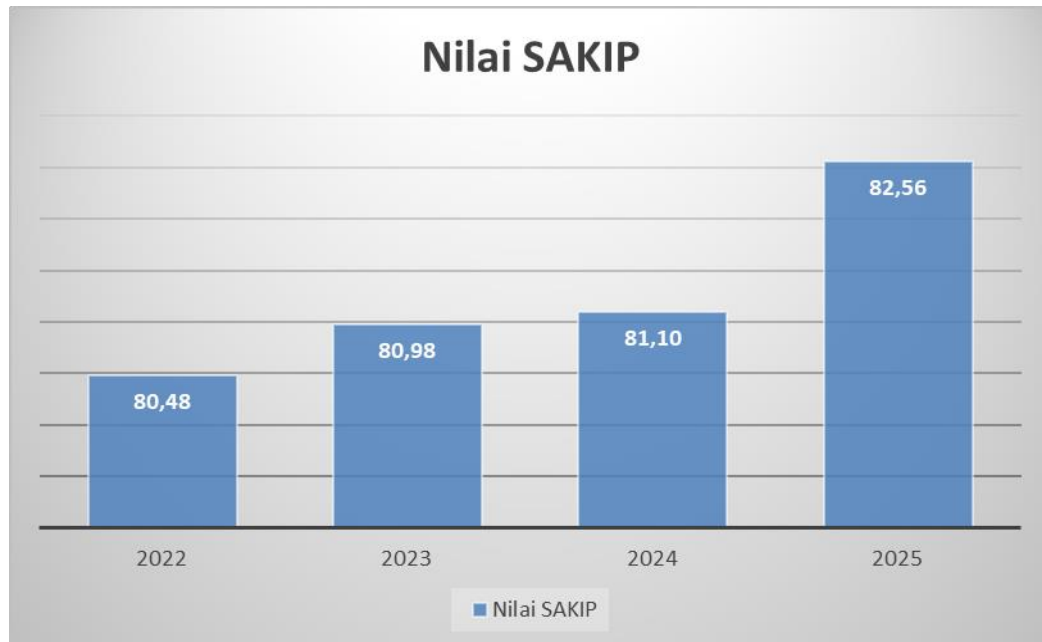
Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu :

- a. Melakukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Melakukan pendampingan kepada sasaran PPKS dalam rangka peningkatan kemandirian;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi.

III.3 PRESTASI KINERJA LAINNYA

Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 82,56. Peningkatan kinerja juga dibuktikan melalui nilai SAKIP Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 81,10.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP di tahun sebelumnya sebagaimana sebagai berikut :



Sumber Data Dinas Sosial

Tabel III.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Sosial dengan Daerah Sekitar/Pemda/Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi
1	Meningkatnya fungsi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	58,73

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Dinas Sosial	Realisasi Pemda	Realisasi Provinsi
1	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	0,066	0,066	-
2	Meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,56	75,67	82,85

Sumber Data Dinas Sosial

Berdasarkan Tabel III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Sosial dengan Realisasi Kinerja Provinsi Jawa Timur, dari 2 indikator kinerja yang ada tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur. Ini dikarenakan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak sama. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) penilaian hanya sampai dengan Provinsi.

III.4 AKUNTABILITAS KINERJA ANGGARAN

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 28.547.288.507 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 23.305.351.481 atau sebesar 81,64% dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel III.4.A.

Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.740.288.140	Rp. 4.294.916.006	90,60%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 262.275.000	Rp. 204.560.261	77,99%
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 21.916.628.400	Rp. 17.389.160.203	79,34%
4	Program Penanganan Bencana	Rp. 93.459.500	Rp. 67.268.521	71,98%
5	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.525.137.467	Rp. 1.346.446.490	88,28%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 9.500.000	Rp. 3.000.000	31,58%

Sumber Data Dinas Sosial

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut :

Tabel III.4.B.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya PPKS yang mandiri	Persentase PPKS yang mandiri	0,022	0,066	300%	Rp. 23.807.000.367	Rp. 19.010.435.475	79,85%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,56	101,30%	Rp. 4.740.288.140	Rp. 4.294.916.006	90,60%
			Rata-rata capaian		200,65%	Total capaian		85,23%

Sumber Data Dinas Sosial

Dengan capaian kinerja sebesar 200,65% dan capaian keuangan sebesar 85,23%, efisiensi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar 115,42%.

Rata-rata capaian sebesar 200,65% dikarenakan adanya dukungan program dan anggaran dari APBN dan APBD Propinsi khususnya bantuan sosial ke penerima manfaat.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada Tahun pelaporan menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang sebagian besar telah memenuhi target. Indikator Meningkatnya PPKS yang mandiri sebanyak 0,066% dari target 0,022% atau sebesar 300%. Selanjutnya, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 82,56 dari target 81,50 atau sebesar 101,30%.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas kelembagaan, serta mutu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, yang tercermin dari membaiknya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, penguatan struktur dan fungsi organisasi, serta meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun ke depan dalam rangka peningkatan kinerja meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan, serta pendampingan berkelanjutan kepada perangkat daerah;
2. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP (SPM, LKPJ, LPPD,dll);
3. Penguatan efektivitas kelembagaan perangkat daerah melalui pembinaan struktur, tata laksana, serta penyelarasan tugas dan fungsi organisasi;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembinaan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan pemanfaatan hasil IKM sebagai dasar perbaikan layanan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan data kinerja, pelaporan, serta tata kelola organisasi.

LAMPIRAN E 81 :

<https://drive.google.com/drive/folders/1qFOowoEAmcfJfWJKxxIZVYzRnOdsoagd?usp=sharing>

LAMPIRAN BUKTI DUKUNG CAPAIAN 2025 :

<https://bit.ly/BuktiPendukung-2025>